

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Disertasi ini bermaksud meneliti tentang ekonomi politik media dalam pemberitaan isu lingkungan dan sumber daya alam pada media lokal di Kalimantan Tengah. Kajian ini menjadi penting untuk memahami dan menganalisis kekuatan kepemilikan dan ideologi media lokal dalam mempengaruhi konten berita lingkungan dan sumber daya alam. Media lokal memiliki posisi penting dalam menyebarluaskan ragam informasi lokalitas. Media lokal hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat lokal atas beragam persoalan yang ada di daerah. Kajian ekonomi politik media secara nasional memang sudah banyak dilakukan, namun kajian ekonomi politik dengan isu spesifik dari persoalan lingkungan dan sumber daya alam ranah lokal menggunakan analisis wacana kritis belum banyak ditemukan, sehingga penelitian ini dengan mengkaji dan menganalisis konstruksi makna yang terkandung pada teks berita, ideologi, kepentingan dan dinamika ekonomi politik media dibalik pemberitaan isu lingkungan dan sumber daya alam di tingkat lokal sebagai aspek kebaruan dalam penelitian ini.

Kajian ekonomi politik media yang telah banyak diteliti cenderung berfokus pada media dan ranah nasional dengan temuan adanya media sebagai alat kepentingan pemilik media bahkan menjadikan media sebagai alat propaganda diantaranya kajian tentang konglomerasi dan/atau konsentrasi kepemilikan industri media baik televisi, radio, koran, majalah dan media online yang dikuasai oleh Media Group dan Surya Paloh, MNC Group dan Hary Tanoesoedibjo, VIVA Group dan Aburizal Bakrie, Kompas Gramedia Group dan Jacob Utama, EMTEK Group dan Kunadi Sariaatmadja, Group Media Trans Corpora/CT Group dan Chairul Tanjung, LIPPO Group dan James Riady, Mahaka Media Abdul Gani dan Erick Tohir, Jawa Pos Group Dahlan Iskan dan Azrul Ananda, dan seterusnya (Nugroho,

Putri, et al.,2012; Lim, 2012; Fahrudin, 2013; Hasan, 2013; Hasibuan, 2014; Karman, 2014; Razak, 2016; Simamora, 2016; Lenggawa, 2019; Sapitri dan Nurafifah, 2020: Darmanto, 2020; Masduki & D'Haenens, 2022; Wahdan et al., 2023, Masduki et al.,2023).

Kajian-kajian tersebut di atas menunjukkan terdapat adanya kecenderungan industri media di Indonesia mengarah pada oligopolistik, monopoli kepemilikan media, sehingga menyebabkan terjadinya pencampuran opini dan fakta. Selain penguasaan lanskap media, para pemilik media juga terlibat sebagai politisi dan sekaligus sebagai pengusaha dalam berbagai sektor. Media menjadi akses untuk melegitimasi kekuasaan politik dan ekonomi yang mereka miliki, sehingga dengan kekuatan monopoli kepemilikan media mereka melakukan berbagai framing pemberitaan, konstruksi berita, dan konstelasi pembentukan agenda setting politik melalui korporasi media yang mereka miliki.

Konglomerasi media yang terjadi mengindikasikan adanya cerminan dari kepentingan pemilik yang kapitalistik, sehingga fungsi kontrol media yang ideal menjadi lemah. Penguasaan media oleh para elit politik sekaligus juga memiliki perusahaan pada berbagai bidang tertentu, maka dengan ragam kepentingan politik yang dimilikinya cenderung akan dominasi dalam kebijakan redaksi media. Oligopoli media yang dikuasai oleh pihak-pihak tertentu akan mengakibatkan konten media menjadi semacam komersialisasi kepentingan, sehingga media arus utamapun akan tunduk pada kepentingan politik penguasa media. Hal ini ditandai dengan pemberitaan yang memiliki kecenderungan berpihak pada kepentingan pemilik ataupun korporasi dalam naungan manajemen yang sama termasuk media online (Fuch, 2010; Tapsell, 2012).

Kajian konglomerasi media ini lekat dengan beberapa hal, sebagai contoh kajian keterlibatan Surya Paloh, Hary Tanoesoedibjo, Chairul Tanjung dalam dukungan dan pergeseran dukungan pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2014 dan 2019, melalui media yang dimiliki menggiring opini masyarakat untuk mendukung sesuai

agenda setting medianya. Eriyanto (2018) menyebutkan bahwa pemberitaan terhadap berbagai isu yang krusial rerata hanya sekadar bingkai berita (*framing*), mengarahkan pandangan publik (*priming*) dan melekat pada penghembusan isu kepentingan (*agenda setting*), tidak terdapat kedalaman, kenapa dan mengapa suatu peristiwa dari suatu isu itu bisa terjadi. Beberapa temuan ini penting secara nasional dengan tema-tema politik (pemilu, pilkada, demokrasi), namun tidak menggambarkan situasi di ranah lokal secara spesifik terutama yang berhubungan dengan isu lingkungan dan sumber daya alam.

Hasil dari berbagai penelusuran yang dilakukan peneliti dengan berbagai sumber dan dokumen, penelusuran pemberitaan serta publikasi laporan penelitian dan artikel, sebagaimana temuan adanya kepemilikan media di tingkat lokal Kalimantan Timur juga dimonopoli media di tingkat nasional dan terjadi perluasan industri media lokal dengan cover nasional (Masduki, et al, 2023). Sebagai contoh Group Jawa Pos memiliki banyak media berbasis lokal di Kalimantan seperti Radar Banjarmasin, Pontianak Post, Kalteng Post, Kaltim Post, Radar Sampit, Radar Nunukan, dan sebagainya.

Hasil observasi peneliti pada beberapa media di Kalimantan dikuasai oleh para pemilik modal yang juga memiliki usaha pada sektor pertambangan dan perkebunan kelapa sawit serta ragam jenis usaha lainnya, sekaligus juga mereka baik sebagai politisi secara langsung maupun tidak langsung merupakan orang lokal. Hasil penelusuran lebih lanjut secara struktur hukum pada media yaitu dalam akta pendirian media, maka para pengusaha pertambangan dan perkebunan kelapa sawit tidak disebutkan sebagai pemilik dari media yang dikuasai tersebut. Sebagai contoh Citra Borneo Indah (CBI) dan H. Abdul Rasyid AS dengan kepemilikan Media Palangka Post dan Borneonews, Hasnuryadi dan PT Hasnur Group menguasai Partai Golkar, pertambangan batubara dan kepemilikan Media Kalimantan News.com juga tidak ditemukan dalam struktur hukum media yang mereka kuasai, namun dari manajemen media dalam hal ini pimpinan redaksi pada media lokal tersebut

menyebutkan kepemilikan media lokal Palangka Post, Borneonews, Kalimantan News.com bahkan dalam pemberitaan tertentu seperti peringatan ulang tahun media, media lokal di atas memang dikuasai oleh pengusaha dan politisi lokal tersebut.

Kepemilikan media lokal yang dikuasai oleh para pengusaha pertambangan dan perkebunan kelapa sawit dalam pemberitaan isu lingkungan dan sumber daya alam pada dua sektor tersebut dalam pemberitaan sebagaimana etika dalam standar perusahaan media, sejatinya bahwa perusahaan media memiliki kewajiban melaksanakan aktivitas pers secara berkualitas dengan mengedepankan perusahaan media yang profesional dalam sisi jurnalistik maupun bisnis. Secara ideal perusahaan media dalam kegiatan bisnisnya harus menjunjung tinggi norma dan etika jurnalistik, karena itu fungsi media sebagai kontrol sosial dan salah satu pilar demokrasi dapat dijalankan tanpa dibebani kepemilikan media berkaitan dengan isu krusial tersebut. Sudut inilah yang menjadi bagian kajian dari peneliti dalam menulis Disertasi ini, apakah kepemilikan media dengan latar belakang pengusaha pertambangan dan perkebunan kelapa sawit objektif dalam pemberitaannya dan analisis wacana kritis menjadi alat untuk meneliti teks berita secara lebih lanjut.

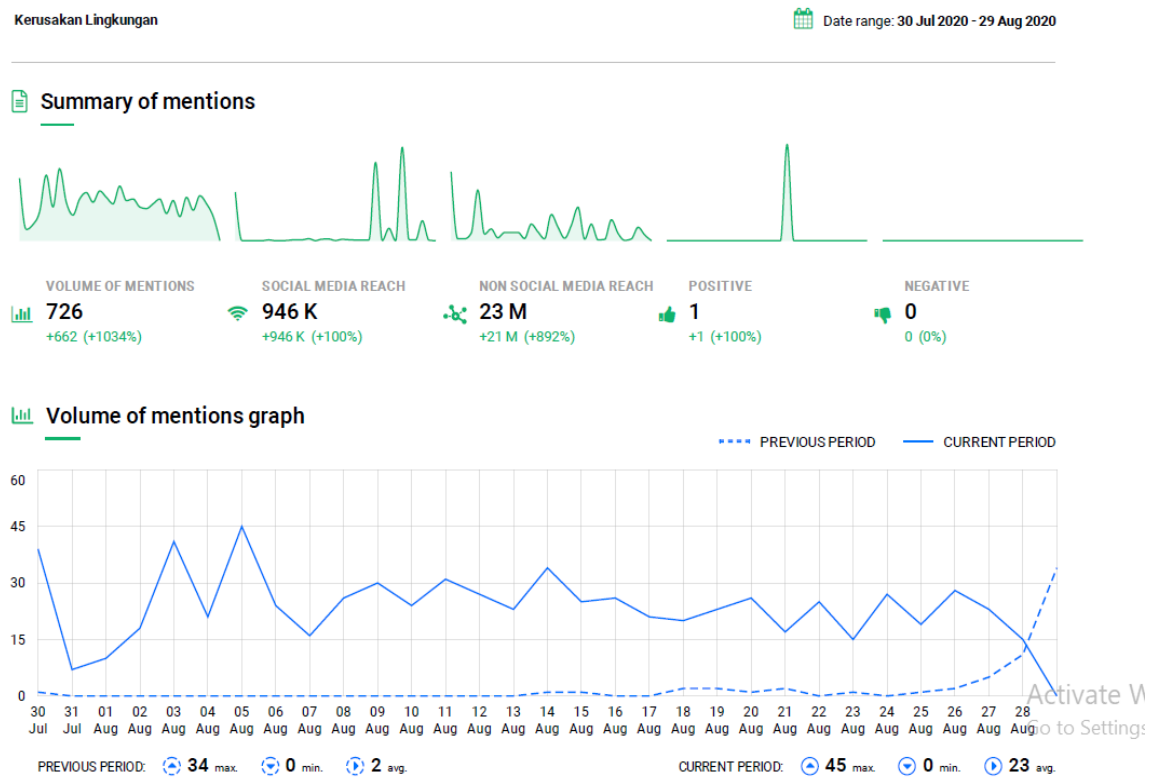
Pandangan peneliti bahwa media lokal sejatinya memiliki peran kunci dalam menyoroti persoalan lingkungan dan sumber daya alam pada tingkat lokal. Media lokal dapat menjadi sumber informasi yang dipercaya dan relevan bagi masyarakat daerah. Media lokal adalah bagian dari masyarakat lokal yang memiliki pemahaman yang mendalam tentang dinamika, tantangan dan prioritas daerah, sehingga wawasan masyarakat daerah semakin kaya berkaitan dengan isu-isu lingkungan dan sumber daya alam krusial baik dampak maupun penyebab persoalan lingkungan terjadi seperti perubahan iklim, deforestasi, pencemaran, limbah, konflik lingkungan, dan sebagainya. Pemberitaan media lokal tentang hal tersebut setidaknya dapat memobilisasi opini publik dan advokasi lokal untuk mendorong tindakan nyata dalam menghadapi tantangan persoalan lingkungan yang terjadi di sekitar masyarakat.

Permasalahan ekonomi politik media lokal dari beragam temuan yang dilakukan para peneliti sebelumnya juga lebih banyak membahas peran media lokal dalam demokratisasi daerah, keberpihakan media dalam proses konten berita kegiatan pemilu dan pilkada, kepemilikan media yang juga mempengaruhi isi media yang dibahas dari sudut komodifikasi dalam aspek demokrasi, maupun framing berita dalam isu demokrasi dan korupsi serta strukturasi media dalam iklan (Sulhan, 2014; Juditha, 2015; Sari, 2016; Nazmuddin, 2016; Rahmat, 2021; Shobah dan Sabiruddin, 2022).

Berangkat dari hal tersebut Disertasi ini bermaksud mengetahui lebih jauh tentang ideologi, relasi kuasa media, dan struktur ekonomi politik media lokal berdasarkan teks berita, dengan fokus studi pemberitaan pada isu lingkungan dan sumber daya alam. Isu ini merupakan isu yang krusial bagi Indonesia dan khususnya daerah Kalimantan termasuk Kalimantan Tengah mengingat dampak yang terjadi dari persoalan dan kerusakan lingkungan yang dalam kurun waktu 10 tahun terakhir ini semakin menguat. Lingkungan dan sumber daya alam yang rusak karena eksploitasi besar-besaran dan alih fungsi lahan mengakibatkan tidak ada penopang untuk resapan air ketika musim hujan dan air pasang terjadi banjir secara terus-menerus terjadi. Kondisi saat ini banjir yang terjadi di wilayah Kalimantan Tengah tidak lagi dihitung dalam 1-2 kali terjadi dalam setahun, tetapi banjir dapat terjadi beberapa kali dalam setahun.

Hal ini juga ditunjukkan dengan adanya pembicaraan tentang kerusakan lingkungan yang dikumpulkan peneliti dengan menggunakan big data pada bulan Agustus 2020 dan Oktober-November 2022. Hasil big data dengan trending hastag #environmental, #kebakaranlahan, #konflikagraria, #sawit, #environment, #sampah, #plastik, #batubara, #pemanasan global, #polusi, #hutan, #perubahan iklim, dan sebagainya, sebagaimana ditunjukkan pada Grafik 1.1, Grafik 1.2, dan Grafik 1.3 bahwa kerusakan lingkungan terjadi akibat berbagai faktor diantaranya adalah persoalan sawit, pencemaran lingkungan,

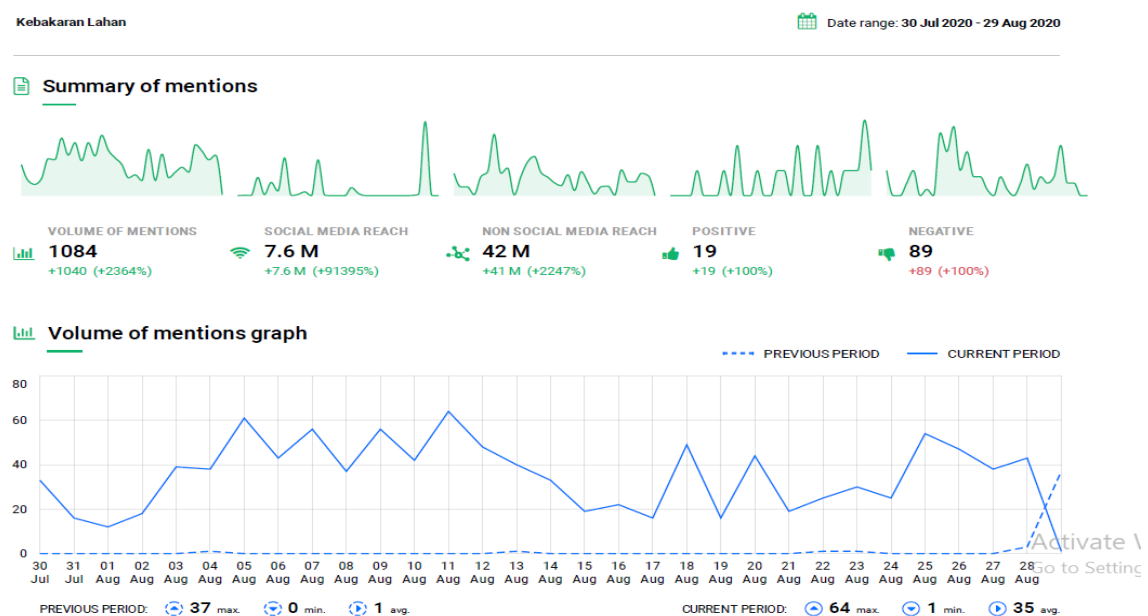
kebakaran lahan, pertambangan legal dan ilegal, konflik agraria, banjir, sampah, alih fungsi lahan pertanian, penebangan liar, dan sebagainya dengan hasil sebagai berikut:



Grafik 1.1 Pembicaraan Kerusakan Lingkungan pada berbagai Platform Media
Sumber: Data diolah Peneliti dengan bantuan Aplikasi Big Data Brand 24, 2020

Grafik 1.1 di atas menunjukkan bahwa pembicaraan adanya kegelisahan masyarakat akibat kerusakan lingkungan menjadi persoalan yang krusial. Perubahan iklim dengan ditandai peningkatan suhu adalah salah satu dampak yang paling dirasakan pada saat ini. Persoalan banjir, tanah longsor, polusi udara, pencemaran air, punahnya flora dan fauna, sumber daya alam yang banyak tergerus bahkan kerusakan ekosistem lingkungan sebagai bentuk telah terjadi penurunan kualitas lingkungan. Penurunan kualitas lingkungan yang diakibatkan daya dukung alam sudah banyak yang rusak, eksploitasi terus-menerus terhadap alam menyebabkan ketidakseimbangan lingkungan dan berdampak pada terjadinya berbagai bencana alam.

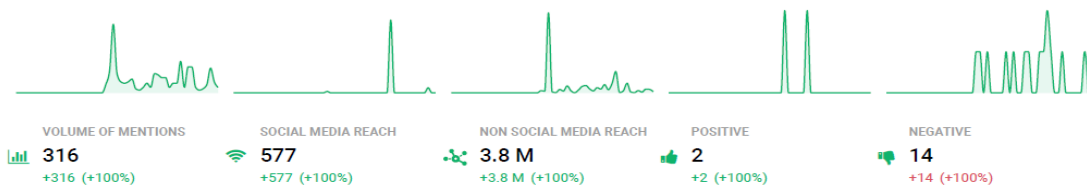
Selanjutnya pada Grafik 1.2 berikut kerusakan lingkungan yang paling banyak juga dibicarakan pada media sosial dan non media sosial adalah berkaitan dengan kebakaran lahan. Kebakaran lahan sering diidentikkan dengan kesalahan pembukaan lahan pertanian oleh warga lokal terutama yang terjadi di daerah Kalimantan dan Sumatera. Kebakaran lahan menyebabkan hutan dan lahan menjadi gundul, asap yang mengganggu kesehatan pernafasan, dan hilangnya area serapan air tanah. Kebakaran lahan yang disebabkan oleh pihak korporasi yang bergerak pada sektor perkebunan ini tidak tersentuh sebagai tren pembicaraan dalam media. Justru kebakaran lahan yang disalahkan dalam pembicaraan adalah masyarakat.



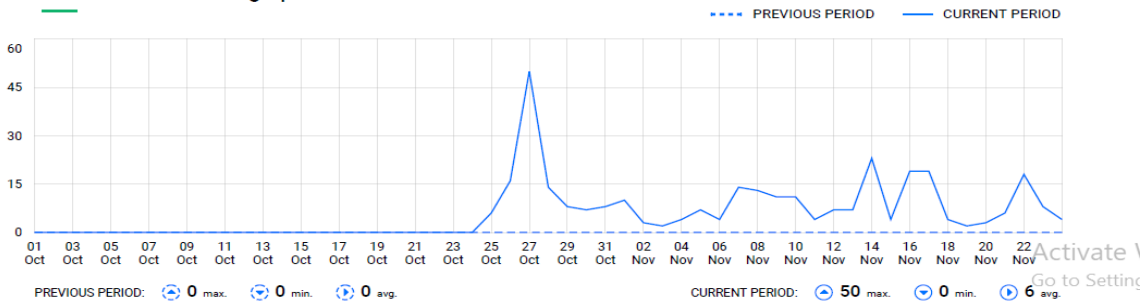
Grafik 1.2 Pembicaraan Kebakaran Lahan pada berbagai Platform Media
Sumber: Data diolah Peneliti dengan bantuan Aplikasi Big Data Brand 24, 2020

Pada Grafik 1.3 berikut persoalan lingkungan adalah berkaitan dengan konflik agraria atau sering juga disebut dengan konflik penguasaan lahan bahkan konflik tanah adat, sengketa tanah antara masyarakat dan perusahaan ini juga menjadi tren pembicaraan. Konflik lahan dalam beberapa pembicaraan banyak menyudutkan posisi masyarakat, sehingga pada area-area tertentu justru masyarakat diminta untuk mengalah atas nama kepentingan yang lebih besar.

Summary of mentions



Volume of mentions graph



Grafik 1.3 Pembicaraan Konflik Agraria pada berbagai Platform Media

Sumber: Data diolah Peneliti dengan bantuan Aplikasi Big Data Brand 24, 2022

Pada 1.3 grafik di atas baik pembicaraan pada media online maupun media sosial berkaitan dengan konflik agraria atau konflik lahan sebagai bagian dari hal yang menjadi salah satu pemicu berbagai persoalan lingkungan mendapatkan berbagai komentar dan opini positif dan negatif. Secara keseluruhan hal ini berarti bahwa persoalan lingkungan dan sumber daya alam menjadi pusat perhatian masyarakat dan komunitas yang peduli pada lingkungan untuk mengkritisi berbagai hal yang berkaitan dengan penyebab terjadinya kerusakan lingkungan.

Pengalaman pribadi peneliti ketika banjir besar melanda berbagai daerah di Kalimantan pada tahun 2021, hasil wawancara, dan observasi peneliti dari berbagai sumber bahwa kerusakan lingkungan terparah di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan adalah banjir yang terus-menerus, alih fungsi lahan, menipisnya lahan untuk pertanian, konflik lahan antara masyarakat dan perusahaan perkebunan maupun pertambangan, persoalan limbah lingkungan, dan kebakaran lahan. Kerusakan terparah lainnya berkaitan dengan kerusakan

akses jalan, angkutan batubara dan kelapa sawit dengan muatan truk yang besar melewati jalan-jalan umum mengakibatkan jalan mudah rusak dan berlubang, sehingga jalan menjadi sulit untuk diakses oleh masyarakat.

Luas wilayah Kalimantan Tengah sebesar 154.444 km² merupakan wilayah provinsi terluas di Kalimantan bahkan di Indonesia. Lahan-lahan di Kalimantan Tengah umumnya digunakan sebagai lahan pertanian dan kebun karet masyarakat. Pembukaan areal satu juta hektar lahan gambut pada masa orde baru untuk pertanian saat itu dan ribuan hektar program *food estate* untuk pertanian dan kebun singkong saat ini membuat banyak pohon-pohon ciri khas lahan rawa ditebang, sehingga juga turut mengganggu ekosistem lingkungan (WALHI Kalteng, 2023).

Selain itu ekosistem lingkungan juga turut tergerus dengan meluasnya pembukaan sektor pertambangan dan perkebunan kelapa sawit. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tahun 2022 bahwa sektor pertambangan dan perkebunan kelapa sawit pada seluruh wilayah 14 Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah baik dikelola oleh perusahaan maupun yang melibatkan masyarakat berupa plasma dalam kawasan hutan mencapai 967.409,01 hektare dengan rincian yang teridentifikasi pelaku pengguna kawasan hutan dikuasai yang paling besar oleh kelompok korporasi untuk sawit dan tambang seluas 793.515,77 hektare, kelompok masyarakat seluas 93.840 hektare, koperasi seluas 16.258,47 hektare dan perorangan seluas 35.231,10 hektare sedangkan 28.561,97 hektare belum teridentifikasi namun terdapat aktivitas penguasaan lahan.

Penguasaan lahan berdasarkan data di atas mengubah posisi hutan menjadi lahan untuk perusahaan membuat usaha pertambangan dan perkebunan kelapa sawit. Alih fungsi lahan ini dalam beberapa kasus di Kalimantan Tengah menimbulkan beragam masalah. Persoalan isu lingkungan dan sumber daya alam di Kalimantan Tengah sebagaimana pemberitaan dalam media harian Palangka Post Edisi Jumat, 31 Agustus 2018 dengan judul “Warga Sebabi

Kotim Keluhkan Pencemaran Sungai Seranau” dimana pada isi berita paragraf 3-5 menyebutkan bahwa ribuan ikan di sungai dan keramba milik warga mati akibat adanya perubahan warna air sungai dan bau minyak kelapa sawit yang diduga tercemar limbah pabrik pengolahan minyak mentah kelapa sawit (CPO) milik PT.Sukajadi Sawit Mekar (SSM) berlokasi di Kabupaten Kotawaringin Timur yang berada di bagian hulu wilayah, sehingga limbah mencemari sungai dan mengakibatkan sungai menjadi berwarna coklat kehitaman serta permukaan air sungai dipenuhi limbah minyak. Berikut cuplikan berita dari media PalangkaPost:

Warga Sebaby Kotim Keluhkan Pencemaran Sungai Seranau

SAMPIT, PPOST

Ardiman, Warga Desa Sebaby, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah mengeluhkan tercemarnya aliran sungai Buluh Tibung dan Sungai Seranau.

“Akibat pencemaran itu ikan yang kami pelihara dalam keramba seluruhnya mati tidak tersisa,” katanya, Kamis (30/7).

Ardiman mengaku pencemaran itu terjadi sejak Minggu (26/8), aliran sungai Buluh Tibung dan sungai Seranau diduga tercemar akibat limbah pabrik pengolahan minyak mentah kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) milik PT Sukajadi Sawit Mekar (SSM).

“Kami menduga sungai kami ini tercemar limbah karena di bagian hulu sana ada pabrik pengolahan minyak kelapa sawit. Warna air sungai Buluh Tibung dan sungai Seranau berubah menjadi coklat kehitaman dan dipermukaan air berkilauan semacam ada minyaknya,” katanya.

Akibat perubahan warna air sungai dan bau minyak kelapa sawit itu juga telah membuat ribuan ikan di sungai dan keramba warga mati.

“Kami warga Desa Sebaby sangat dirugikan atas kejadian ini, saya berharap pihak perusahaan bisa bertanggungjawab dengan mengganti rugi atas kematian ikan kami dalam keramba itu,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Desa Sebaby Dematius mengaku telah melaporkan kejadian tersebut ke Kecamatan Telawang dan perusahaan kelapa sawit yang memiliki pabrik di sekitar sungai Buluh Tibung dan sungai Seranau.

“Memang sangat banyak ikan yang mati di aliran sungai Buluh Tibung dan sungai Seranau. Kami juga telah mengimbau kepada warga untuk tidak mengonsumsi ikan tersebut guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan,” katanya.

Dematius juga mengaku masih belum mengetahui secara pasti penyebab kematian ribuan ikan tersebut, namun demikian dia telah meminta pihak perusahaan untuk membantu kerugian warga yang ikan dalam kerambanya mati.

“Kita masih belum tahu dengan pasti apakah ikan itu mati akibat aliran sungai yang tercemar limbah atau akibat adanya oknum warga meracun atau sebagainya,” tuturnya.

Dematius mengaku kejadian ini telah ditangani pihak pemerintah daerah dan aparat kepolisian dengan sebelumnya mengambil contoh air sungai yang diduga tercemar tersebut.(ant/P7)

Gambar 1.1 Berita Warga Sebaby Kotim Keluhkan Pencemaran Sungai Seranau
Sumber: Berita PalangkaPost, Edisi 31 Agustus 2018

Pemberitaan di atas merupakan berita yang ditulis media Palangka Post dengan fokus pada perusahaan PT. Sukajadi Sawit Mekar (SSM), pencemaran lingkungan ditulis dengan gaya bahasa yang menyudutkan perusahaan SSM, pada berita tidak menghadirkan secara berimbang sumber untuk memberikan penjelasan. PT.SSM sendiri bukan merupakan bagian dari CBI group dengan *holding/sister company* Palangka Post, tetapi merupakan bagian Musim Mas Group. *Straight news* edisi ini hanya menghadirkan masyarakat sebagai terdampak akibat adanya pencemaran lingkungan, kerugian warga yang besar, masyarakat merugi karena penghasilan masyarakat dari keramba ikan tidak dapat dijual dan masyarakat tidak dapat beraktifitas dengan menggunakan sungai tercemar. Berita dihadirkan hanya sebatas informasi semata bahwa telah ada pencemaran limbah, masyarakat terdampak, tetapi tidak dilakukan penelusuran berita mendalam termasuk dalam menghadirkan dari berbagai pihak yang kompeten terutama pihak yang disebutkan bertanggung jawab atas terjadinya pencemaran lingkungan serta solusi untuk mengatasi persoalan tersebut.

Persoalan lingkungan lainnya yang diberitakan adalah akibat limbah lumpur pertambangan yang berdampak rusaknya kebun karet warga sekitar, diberitakan pada media Borneonews Edisi 25 November 2018 dengan judul "*Limbah Tambang Batubara PT SEM disebut Rendam Kebun Warga*". Limbah lumpur tambang batubara PT.SEM ditulis sangat merugikan masyarakat. PT.SEM sendiri berada di Kabupaten Barito Timur dan bukan merupakan bagian dari sister/holding company CBI Group yang menaungi Borneonews. Berita mengandung analogi yang bahwa limbah lumpur tambang batu bara PT.SEM berdampak pada masyarakat tidak memperoleh penghasilan dalam jangka waktu yang sama. Limbah lumpur yang dihasilkan perusahaan ditampung dalam kolam khusus penampungan limbah, namun kolam penampungan limbah tersebut mengalami kebocoran, berikut cuplikan berita:

Limbah Tambang Batubara PT SEM Disebut Rendam Kebun Warga

Oleh Prasajo Eko Aprianto -- 25 November 2018 - 18:10 WIB



Limbah disposal disebut dari tanggul kolam PT SEM jebol sehingga merendam sebagian kebun karet milik warga.

Limbah disposal disebut dari tanggul kolam PT SEM jebol sehingga merendam sebagian kebun karet milik warga.

BORNEONEWS, Tamiang Layang - Diduga akibat tanggul kolam limbah disposal PT Senamas Energindo Mineral (SEM) di Desa Janah Jari, Kecamatan Awang, Kabupaten Barito Timur (Bartim), sejumlah warga menuntut perusahaan tambang batubara ini bertanggung jawab atas limbah lumpur yang masuk di areal kebun karet mereka.

Perkebunan warga yang terdampak limbah tersebut milik Julianto, Yohanes, Iran, Astiarap, Purda, Surta dan Ider Uly.

Kasus ini pun direspon manajemen perusahaan dengan melakukan mediasi dengan para pemilik lahan di Kantor Desa Janah Jari, Sabtu (24/11) kemarin.

Mediasi dihadiri Camat Awang Kandurung, Kapolsek Awang Ipda Rino Heriyanto, perwakilan Koramil Awang Sertu Banturo, Kades Janah Jari Dikianto Utu dan manajemen PT SEM melalui PJO Pit SEM Janah Jari Aris Arnanto beserta humas PT SEM Dolpy.

Camat Awang Kandurung mengaku terkejut sebab selama ia menjabat sebagai camat tidak pernah diberitahukan ada aktivitas PT SEM masuk wilayahnya.

"Ke depan kita berharap adanya koordinasi antara perusahaan dengan pemerintah kecamatan. Jangan setelah ada masalah masyarakat baru kita dilibatkan," tandasnya.

Tentang masalah pencemaran limbah, atas nama pemerintah camat mengharapkan adanya tanggung jawab dari perusahaan untuk menyelesaikan sesuai tuntutan masyarakat.

"Apalagi kalau kasus tersebut menyangkut dampak lingkungan harus segera diatasi," katanya.

Menyikapi permasalahan itu manajemen PT SEM melalui PJO Lit Janah Jari, Aris Arnato menyatakan pihaknya bertanggungjawab atas terjadinya luapan lumpur dari kolam pengendapan limbah disposal.

Ia mengaku, siap dan bertanggung jawab penuh dan akan melaksanakan pembersihan lumpur di areal kebun karet milik warga dengan menggunakan mesin alkon dan rencananya akan mulai bekerja pada 3 Desember 2018 mendatang.

Namun, sebelum dilakukan pembersihan lumpur ia akan berkoordinasi dengan pimpinan PT SEM untuk rencana tindak lanjut penanganan penyelesaian sesuai tuntutan masyarakat terdampak.

"Sebelum aktivitas kita akan lakukan koordinasi dengan pihak manajemen perusahaan dan pihak pemerintah desa terkait jadwal pembersihan melalui surat tertulis kepada kases untuk menyampaikan kepada para pihak yang terkena limbah," pungkasnya. (PRASOJO EKO/B-5)

Gambar 1.2 Berita Limbah Tambang Batubara PT.SEM Disebut Rendam Kebun Warga

Sumber: Berita BorneoNews, Edisi 25 November 2018

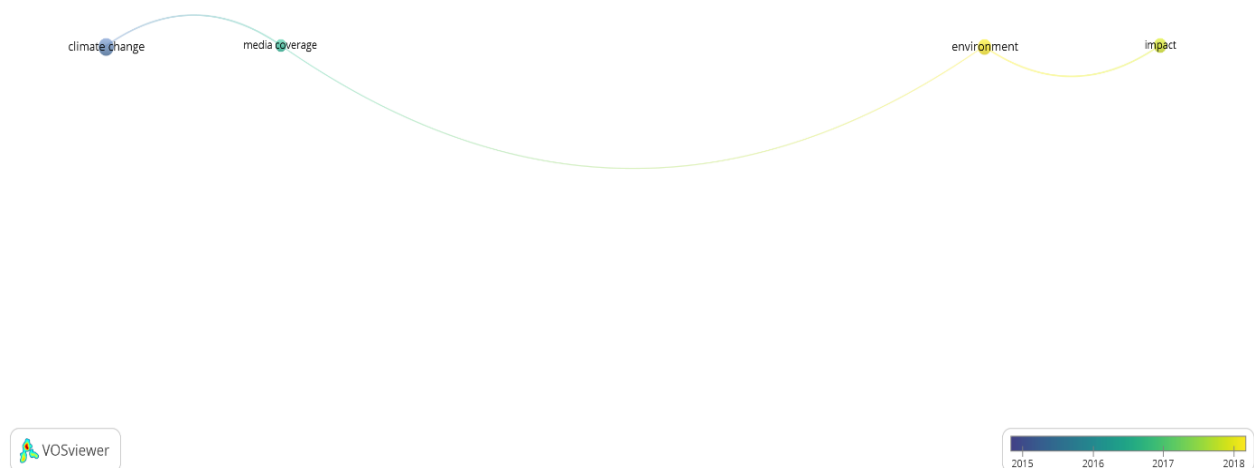
Pada potongan dua berita di atas terdapat teks “keluhkan” dan “rendam”. Teks “keluhkan” yang merujuk pada makna luapan emosi untuk memperoleh perhatian, namun hanya pada kemampuan mengeluh dengan keragu-raguan sebagai reaksi atas kondisi akibat pencemaran tanpa mampu berbuat apa-apa. Sedangkan kata “rendam” merujuk pada makna bahwa kebun karet warga dalam kondisi sedang digenangi limbah, sehingga berdampak pada kebun karet tidak dapat difungsikan untuk mata pencarian warga. Pemberitaan dampak

lingkungan ini akibat adanya korporasi yang bergerak pada sektor lingkungan memberikan efek negatif dan risiko yang harus dihadapi warga ketika lingkungan masyarakat baik tempat tinggal maupun pekerjaan masyarakat berdampingan dengan korporasi bidang lingkungan. Korporasi tambang batu bara ini bukan merupakan bagian dari perusahaan milik Citra Borneo Lestari, sehingga berita terkesan menyudutkan dengan menekankan pentingnya tanggung jawab perusahaan atas dampak limbah mencemari lingkungan dan mengganggu penghasilan masyarakat.

Berangkat dari hal-hal tersebut di atas secara *empirical gap* di atas, peneliti tertarik untuk mendalami dan mengkaji berita-berita yang berkaitan dengan persoalan lingkungan dan sumber daya alam dengan menganalisis konten pemberitaan isu krusial dan sensitif sektor lingkungan dan sumber daya yang dilakukan oleh media lokal dengan melihat celah kecenderungan yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Media lokal sebagai sumber informasi bagi masyarakat untuk mengetahui berbagai hal peristiwa yang terjadi, khususnya yang berkaitan dengan daerahnya. Isu lingkungan dan sumber daya alam merupakan bagian hakiki untuk keberlangsungan hidup manusia di bumi sepanjang waktu. Kondisional lingkungan dan sumber daya alam yang banyak beralih fungsi menjadi lahan-lahan pertambangan maupun perkebunan kelapa sawit menjadi hal urgen untuk dikaji lebih dalam dengan melihat aspek keberpihakan media lokal pada isu krusial tersebut.

Kajian ekonomi politik media dalam pemberitaan isu lingkungan dan sumber daya alam belum banyak diangkat terutama dari posisi strategis media lokal. Media lokal seharusnya berada pada posisi mewakili suara masyarakat secara lokal. Memberikan informasi-informasi strategis secara lokal dan membantu dalam mencermati serta mengambil kebijakan lokal. Hal ini sebagaimana juga penelusuran dari penulis dari berbagai penelitian sebelumnya yang telah dilakukan, bahwa kajian ekonomi politik media dalam isu lingkungan

penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Ekonomi politik dan media lokal serta kekuatan politik lokal menjadi *research gap* dalam penelitian ini dengan isu khusus tentang berita lingkungan dan sumber daya alam. Bahkan jika dilakukan penelusuran lebih lanjut dengan mengurai beberapa item, maka terlihat posisi media dan isu lingkungan dikaji dengan sisi isu yang terpisah dan tidak berkaitan satu dengan yang lainnya. Hal ini ditandai dengan adanya jarak yang cukup jauh dalam tema dan judul penelitian dengan memuat unsur *climate change* dan *media coverage*, *environment* dan *impact* sebagaimana gambar berikut:



Gambar 1.4 Peta Jarak Penelitian Kajian Ekonomi Politik Media dan Isu Lingkungan
Sumber: Olahan Penulis, 2023 dengan bantuan VOSviewer dan Publish or Perish

Pada data tersebut menunjukkan bahwa kajian ekonomi politik media dikaitkan dengan pemberitaan isu lingkungan dan sumber daya alam belum mendapat perhatian komprehensif dengan memuat berbagai pertalian unsur persoalan lingkungan dari hulu dan hilir. Cakupan

media yang dikaji hanya didasarkan pada adanya pemberitaan perubahan iklim dan dampak dari perusakan lingkungan. Kajian media yang dilakukan mengambil sudut peran media sebagai sumber informasi dalam persoalan lingkungan dan dampaknya saja. Jarak *research gap* media lokal dan berita isu lingkungan dan sumber daya alam khususnya media lokal di Kalimantan Tengah dengan fokus analisis teks berita isu lingkungan dan sumber daya alam dengan relasi kuasa kepemilikan media sekaligus relasi kuasa korporasi sektor lingkungan dan sumber daya alam dapat menjadi celah berbeda penelitian ini dengan penelitian lainnya.

Pentingnya meneliti ekonomi politik media lokal dalam pemberitaan isu lingkungan dan sumber daya alam dengan melihat posisi media memiliki peran penting dalam membentuk opini publik dan mempengaruhi kebijakan pemerintah terhadap isu tersebut. Dalam konteks ekonomi politik, media memiliki hubungan yang kompleks dengan pemilik modal dan kekuasaan politik, yang dapat mempengaruhi pemberitaan dan agenda media. Media memiliki peran kunci dalam membentuk pandangan masyarakat tentang isu lingkungan dan sumber daya alam. Dalam era modern, media menjadi salah satu sumber informasi utama bagi masyarakat untuk memahami isu-isu tersebut. Namun, media juga dapat memainkan peran yang merugikan ketika media dioperasikan semata-mata untuk kepentingan ekonomi atau politik tertentu oleh pemilik media (Karlberg, 2004).

Pemberitaan isu lingkungan dan sumber daya alam pada media lokal belum banyak dikaji. Media lokal memiliki potensi besar untuk mempromosikan perhatian masyarakat dan penyebaran informasi terhadap isu-isu lingkungan dan sumber daya alam yang berkaitan dengan wilayah secara lokalitas. Nugroho dan Qodari (2018) menyebutkan bahwa pengaruh pemilik modal dan kekuasaan politik dalam operasional media lokal dapat membatasi atau bahkan menutup ruang untuk pemberitaan dan advokasi terkait isu-isu tersebut. Oleh karena itu, penelitian mengenai ekonomi politik media lokal dalam isu lingkungan dan sumber daya alam menjadi sangat penting untuk memahami lebih lanjut bagaimana faktor ekonomi politik

dapat mempengaruhi pemberitaan media dan bagaimana media dapat memainkan peran yang positif dalam mempromosikan kesadaran masyarakat terhadap isu-isu tersebut. Melalui penelitian ini, dapat dihasilkan rekomendasi kebijakan yang berorientasi pada perbaikan kualitas dan kemandirian media lokal serta mempromosikan transparansi dan akuntabilitas media di sektor isu lingkungan dan sumber daya alam.

Pada penjelasan di atas, wilayah Kalimantan secara umum adalah daerah yang memiliki kekayaan sumber daya alam dan identik dengan pengelolaan sektor pertambangan dan perkebunan. Isu ini dalam ranah praktis dan akademik menarik perhatian mengingat isu konflik lahan dan dampak lingkungan yang dihasilkan. Perhatian ilmuan sebagian besar terserap dalam kasus-kasus yang terjadi dan lebih banyak melihatnya dalam keterkaitannya dengan aspek hukum maupun hanya sebatas framing pemberitaan. Namun, jarang sekali yang melihat, bagaimana konstelasi media menentukan posisi mereka, dan apa penjelasannya. Padahal, di beberapa wilayah di Kalimantan khususnya Kalimantan Tengah, hasil observasi pada sebagian media lokal telah dikuasai oleh pengusaha perkebunan dan pertambangan yang memiliki aset besar dan pengaruh besar dalam politik provinsi dan kabupaten/kota bahkan nasional.

Disertasi ini, bermaksud menjelaskan kerumitan ini dengan menggali aspek ekonomi politik media lokal berdasarkan pemberitaan media lokal di isu lingkungan dan sumber daya alam. Kajian media lokal dan isu lingkungan dan sumber daya alam sendiri berdasarkan pemetaan hasil penelitian dan kajiannya sebelumnya masih terbatas pada framing pemberitaan sampah, framing pemberitaan banjir, persepsi masyarakat tentang pemberitaan lingkungan hidup, media dan pemilu daerah, peran media lokal dalam mendorong demokratisasi, isu lingkungan dan perempuan. Hal inilah mengapa disertasi ini mengangkat pemberitaan isu lingkungan dan sumber daya alam yang dilakukan oleh media lokal dengan

melakukan pendalaman struktur ekonomi politik medianya dengan menggunakan analisis wacana kritis.

Media pada prinsipnya memiliki beberapa kekuatan diantaranya dapat mengubah opini publik, namun jika terdapat fenomena konglomerasi media yang menyebabkan adanya komersialisasi media dan konsentrasi bisnis media, maka media dapat menjadi alat dominasi dan hegemoni dalam masyarakat, sehingga ini menjadi ancaman kebebasan dari media itu sendiri serta kebebasan untuk masyarakat memperoleh informasi yang seharusnya (McQuail dan Deuze, 2020; Akhmad, 2019). Hal lain yang dikemukakan Schieck (2003) berpendapat bahwa kehadiran media yang independen dapat menjadikan media sebagai *watchdog* bagi pemerintah dan media untuk mengedukasi publik atas berbagai isu penting yang berpengaruh dalam kehidupan mereka. Saat ini secara kondisional belum terdapat diversifikasi media di Indonesia, hal ini ditandai dengan menguatnya kepemilikan media sampai ke tingkat lokal dan beberapa media lokal di Kalimantan juga telah dikuasai oleh para konglomerasi media tersebut di atas terutama isu lingkungan dan sumber daya alam dalam pemberitaan media lokal masih lebih banyak berkaitan dengan dampak dan bagaimana mengelola lingkungan yang baik seperti melakukan reboisasi maupun reklamasi bekas galian-galian tambang batubara.

Isu lingkungan dan sumber daya alam menjadi bagian penting dalam berbagai isu kebijakan dunia bahkan pada G20 isu ini menjadi pusat perhatian yang mendapat banyak catatan. Isu lingkungan dan sumber daya alam menjadi strategis tidak hanya sekadar memperhatikan berbagai dampak yang muncul, namun yang paling krusial adalah keberlanjutan kehidupan bagi masyarakat di bumi. Pemberitaan isu lingkungan berkaitan bencana seperti banjir dan tanah longsor maupun yang berkaitan dengan konflik agraria hanya sekadar informasi pada masyarakat yang tidak menyentuh pada aktor dan kebijakan penyebab terjadinya bencana dan konflik tersebut. Terdapat kecenderungan untuk

mengungkap dan mengulas pemberitaan di isu lingkungan cenderung tidak sekritik pemberitaan kriminal maupun pemberitaan lainnya.

Kecenderungan dampak kerusakan lingkungan yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Dampak kerusakan lingkungan di wilayah Kalimantan dengan kondisi banjir yang terus-menerus dan merendam berbagai wilayah tidak hanya terjadi sekali atau dua kali dalam setahun namun kondisi saat ini setiap saat hujan deras, pasang air laut, maka banjir menjadi hal yang meresahkan masyarakat. Selain itu juga dampak kerusakan yang lain adalah tanah longsor, air sungai yang keruh, hilangnya berbagai habitat, dan sebagainya. Perebutan dan penguasaan lahan untuk berbagai sektor juga menjadi bagian persoalan mengakibatkan tidak hanya dampak pada lingkungan, namun juga menimbulkan konflik termasuk konflik agraria/lahan.

Kajian ini dilakukan di Kalimantan Tengah dengan berbagai pertimbangan bahwa kajian media yang berkaitan dengan ekonomi politik media terutama pada isu lingkungan dan sumber daya alam belum pernah dibahas secara spesifik dalam berbagai kajian sebelumnya dan belum pernah menyentuh area di Kalimantan Tengah khususnya pemberitaan isu tersebut pada media lokal. Kajian ini difokuskan pada media lokal di Kalimantan Tengah dan kepemilikan media. Kalimantan Tengah sendiri sebagai salah satu wilayah yang terluas memiliki karakteristik dan tantangan dalam mengelola sumber daya alam dan lingkungan. Studi ini akan memberikan gambaran yang lebih khusus tentang bagaimana media lokal di Kalimantan Tengah berinteraksi dengan lingkungan dan sumber daya alam yang ada di Kalimantan Tengah serta bagaimana faktor-faktor ekonomi politik dapat mempengaruhi pemberitaan tentang isu-isu yang berkaitan dengan lingkungan dan sumber daya alam.

Kajian ini mengembangkan penelitian sebelumnya dengan berbagai isu yang dilakukan oleh Hasan, H dan Mohd. A (2014, h.30) tentang politik ekonomi kepemilikan media dan dampaknya pada independensi jurnalis di Malaysia. Kajian Sari Y (2018, h.34) berkaitan

dengan politik media kajian analisis kritis pemberitaan isu lingkungan hidup di Indonesia. Kajian Permadi (2018, h.22) berkaitan dengan perspektif ekonomi politik media dengan membahas tentang terorisme dan radikalisme di media massa Indonesia. Kajian. Kajian Pertiwi dan Raharjo (2020, h.18) berkaitan dengan ekonomi politik dengan fokus penjualan ruang iklan pada media televisi di Indonesia.

Dalam kajian media lokal Indonesia, disertasi ini juga menelusuri perbedaan penelitian dengan kajian Adikara (2022, h.81-100) yang berfokus pada framing independensi media lokal di Yogyakarta berkaitan dengan persoalan konflik agraria menggunakan konsep *hierarchy of influence* dalam memetakan faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan ekonomi politik pada media. Pratama dan Nurlalelawati (2021, h.37) yang mengkaji politik ekonomi media lokal dalam persoalan kebakaran hutan di Provinsi Riau. Kajian Kusbiantoro, B dan Maulana (2020, h.12) berkaitan dengan ekonomi politik pemilik media dan dampaknya pada kelangsungan industri media lokal di Indonesia. Kajian Rahman (2020, h.36) berkaitan dengan trik pemasaran perusahaan industri kelapa sawit seolah-olah ramah lingkungan di media lokal. Kajian Agus dan Abdillah (2019, h.17) berkaitan dengan isu lingkungan dan politik media online lokal di Indonesia. Kajian Wijaksono (2019, h.23) berkaitan dengan ekonomi politik media lokal dalam pemberitaan kasus PT.Freeport Indonesia serta kajian Wahyudi dan Hapsari (2017, h.33) tentang politik media dalam peliputan bencana alam di TVRI dan Metro TV.

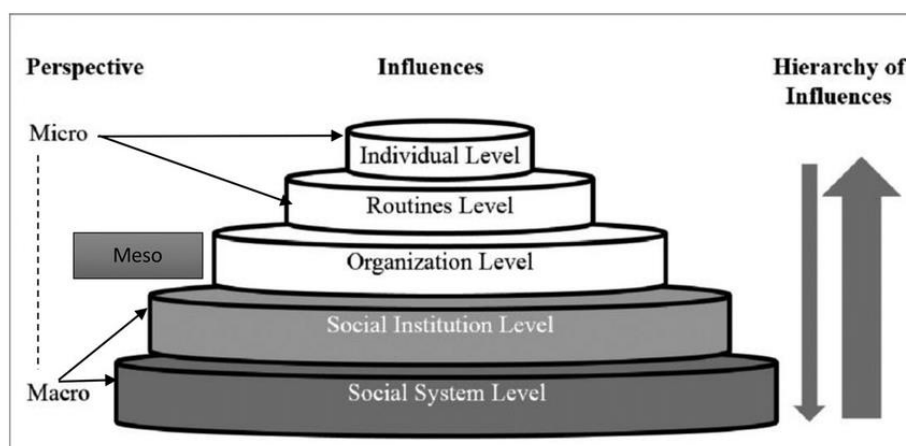
Kajian media di Kalimantan yang dilakukan oleh Eriyanto (2004, h.43-51) tentang dinamika pers lokal di Kalimantan berkaitan dengan perolehan iklan di media cetak dikuasai oleh dua kelompok penerbitan yaitu Kompas Gramedia dan Jawa Pos. Kajian Sulhan (2006, h.317-335) berkenaan dengan fenomena pers lokal di Kalimantan dengan melihat kepemilikan media massa, relasi iklan dan kepentingan media serta dinamika audiens dan sumber berita. Kajian Sari (2016, h. 121-142) berkaitan dengan ekonomi politik media di

Kalimantan Selatan juga mengantarkan pada adanya struktur kekuatan kepemilikan media dalam mengarahkan isi pemberitaan namun tidak menjelaskan apa isi pemberitaan yang diarahkan. Kajian Dinata (2021, h.90-100) berkaitan dengan framing media lokal di Kabupaten Lamandau Kalimantan Tengah dalam pemberitaan kebakaran lahan. Kajian Shobah dan Sabiruddin (2022, h. 116-126) menunjukkan framing Media Lokal di Kalimantan Timur dimana berita yang dimuat media tentang pelanggaran HAM berkaitan dengan persoalan meninggalnya masyarakat karena kegiatan pertambangan namun dalam kajian ini tidak menyebutkan penyebabnya, dan kajian ekonomi politik media pun tidak dibahas secara runtut. Berdasarkan hal di atas, meski terdapat kajian dilakukan pada media lokal di Kalimantan namun belum berfokus pada ekonomi politik media di persoalan lingkungan dan sumber daya alam. Pembahasan ekonomi politik media tidak tersentuh secara detail dalam hasil penelitian. Pengulasan informasi tentang lingkungan dan sumber daya alam dalam pemberitaan lebih banyak dibahas secara umum.

Media sebagai inti kerja pers. Dalam berbagai kajian pers terbagi dalam dua posisi yaitu menjalankan bisnis media sekaligus sebagai kontrol sosial dalam pilar demokrasi negara Indonesia. Model bisnis dan konten pemberitaan menjadi dua persoalan yang membawa konsekuensi pada kualitas pemberitaan. Konten pemberitaan umumnya terbentuk oleh minimal empat faktor yang meliputi editorial, afiliasi politik, kepentingan iklan/bisnis, dan kepentingan *sister company*. Keempat faktor ini menyebabkan daya kritis pers cenderung melemah dan hanya menjadikan berita sebagai konsumsi informasi semata bagi masyarakat (Nusdo, 2020).

Dalam kajian ini, pendekatan ekonomi politik media dan *hierarchy of influences* menjadi pendekatan untuk menggali intensitas pemberitaan media lokal di Kalimantan Tengah dengan isu lingkungan dan sumber daya alam dan melihat pandangan jurnalis atas isu dimaksud termasuk pola budaya kerja dalam peliputan berita. Konsep *hierarchy of influences*

untuk melihat bagaimana kebijakan redaksi dan analisis faktor yang memengaruhi kebijakan redaksi media massa lokal Kalimantan Tengah. Konsep ini menjelaskan berbagai faktor yang memengaruhi pengambilan keputusan dalam kegiatan jurnalistik dan dalam hal ini kebijakan redaksi dalam memuat berita lingkungan dan sumber daya alam. Terdiri dari tiga level: micro, meso, dan macro level. Semakin besar ruang lingkupnya, semakin besar pula pengaruhnya pada faktor lain yang lebih spesifik. Teori hirarki pada level individu menjadi pusat utama dalam kajian ini berkaitan dengan budaya kerja jurnalis lapangan/reporter dan editor yang memiliki sudut pandang tersendiri tentang berita yang akan dimuat bahkan adanya kepentingan dalam hal ini agenda khusus dan kesepakatan yang sangat berpengaruh pada konten berita.



Gambar 1.5 *Hierarchy of Influences*

Sumber: Shoemaker & Reese, 2014; Wahl-Jorgensen & Hanitzsch, 2020; Dimitrova, 2021

Pendekatan ekonomi politik media menjadikan media sebagai subjek yang bertanggungjawab dalam proses komunikasi yang terjadi dengan khalayak (Stephen and Foss, 2010). Menurut Mosco (2009), politik ekonomi sebagai suatu pendekatan disiplin hubungan kekuasaan dengan menempatkan tiga hal utama meliputi sumber produksi, distribusi dan konsumsi dalam sumber daya komunikasi. Kemudian Mosco menggunakan tiga pendekatan dalam melihat media massa, yaitu komodifikasi berupa segala sesuatu dapat

diperdagangkan baik konten, khalayak, dan pekerja media. Spasialisasi sebagai bentuk mengatasi hambatan dalam kehidupan sosial (jarak dan waktu), dan ketiga disebut strukturasi, dimana strukturasi bekerja pada level ideologi yang diseragamkan dengan cara terstruktur.

Ekonomi politik media juga dipandang dari sudut Herman dan Chomsky (2008) bahwa media massa merupakan alat propaganda dan media sarat dengan berbagai kepentingan terutama kepentingan pemiliknya, kepentingan penguasa dan seluruh mata rantai yang terlibat di dalamnya. Selain itu keutamaan ideologi media dapat mengaburkan tujuan utama dari keberadaan media yang sesungguhnya. Makna media menjadi bias dari tugas utamanya sebagai kontrol sosial kekuatan. Media yang menghembuskan isu-isu yang sesuai dengan arah media menyajikan berita yang tidak sesuai dan tidak dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga informasi-informasi tersebut menjadi pintu masuk bagi pandangan masyarakat dalam memahami apa yang terjadi pada sekitar kita dan melahirkan sikap khalayak yang memihak dan peduli pada berita yang telah menerpa masyarakat tadi. Ideologi media menjadi pertanyaan dalam kajian ini, sehingga dengan paradigma kritis menggunakan analisis wacana kritis dapat membongkar ideologi yang tersembunyi pada media lokal yang diteliti.

Persoalan lingkungan merupakan persoalan global yang akan menjadi perdebatan berbagai pihak, mengingat keberlangsungan hidup di bumi sangat tergantung dengan kondisi lingkungan dan sumber daya alam. Suara-suara pemberitaan tentang isu lingkungan dan sumber daya alam banyak diangkat oleh berbagai media massa nasional, namun minim dalam pemberitaan lokal secara detail. Hal ini merujuk pada kondisional fakta bahwa telah terjadi banjir dan tanah longsor hampir di seluruh provinsi di Kalimantan sepanjang tahun 2021 sampai dengan sekarang. Persoalan besarnya adalah apakah bencana alam seperti banjir dan tanah longsor yang terjadi di Kalimantan disebabkan oleh kerusakan lingkungan semata dan sumber daya alam yang terus dikeruk atau terdapat faktor penyebab lainnya. Apakah

masyarakat tidak mendapatkan pendidikan dan informasi tentang bagaimana kondisi lingkungan dan sumber daya alam yang ada di Kalimantan? Apakah media massa lokal yang memiliki fungsi sebagai sarana informasi dan pendidikan memberikan edukasi kepada masyarakat terhadap persoalan lingkungan dan sumber daya alam? Atau media massa melemah fungsi kontrolnya karena kepemilikan media. Dan apakah hal ini juga terjadi pada media massa lokal? Apakah para jurnalis yang idealis mengalami intimidasi dan kekerasan jika menginformasikan tentang persoalan lingkungan dan sumber daya alam yang ada di Kalimantan khususnya Kalimantan Tengah baik dari pemilik media maupun pihak eksternal lainnya?

Walhi dan Forest Watch (2018) menyebutkan bahwa sebaran data pada provinsi di Indonesia dengan kerusakan lahan akibat kebakaran hutan dan lahan gambut serta alih fungsi lahan akibat pertambangan dan perkebunan kelapa sawit serta adanya konflik lahan terbesar adalah Provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Utara, Maluku Utara, dan Sumatera Selatan. Sejalan dengan data tersebut dalam beberapa kajian tentang lingkungan setidaknya terdapat ada dua faktor yang menyebabkan kerusakan lingkungan dan sumber daya hutan sebagai akibat pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang ditunjang oleh sektor kehutanan, perkebunan, dan pertambangan yang terjadi pada beberapa provinsi tersebut, yaitu : (1) tidak berimbangnya porsi kegiatan pemanfaatan dengan kegiatan rehabilitasi hutan dalam kebijakan pengelolaan hutan dan lahan dimana rehabilitasi hutan tidak sepadan dengan besarnya kerusakan lahan; (2) pemanfaatan yang lebih terkonsentrasi pada pemanfaatan hasil hutan, tambang dan kebun kelapa sawit yang menggerus lahan dan ini menjadi persoalan lingkungan yang tiada habisnya (Hidayat,H, 2008; Barkatullah, 2018; Agus, B&Abdillah, 2019).

Kajian lain pemanfaatan lahan di Kalimantan Tengah dalam sektor perkebunan kelapa sawit sebagaimana penelitian Alfirdaus, et.al (2020) tentang adanya bisnis kelapa sawit yang

tidak hanya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar, perluasan usaha kebun kelapa sawit juga melibatkan para petani lokal sebagai bagian dari politik kelapa sawit dalam bentuk koperasi kelapa sawit. Hasil wawancara dengan jurnalis lingkungan Mongabay.co.id (BD, 5 Oktober 2023) bahwa pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit maupun lahan pertambangan memiliki dampak:

“dampak buruknya, hutan banyak beralih fungsi ke sawit. keanekaragaman hayati (biodiversity) rusak karena digantikan dengan tanaman monokultur. ruang hidup masyarakat adat, masyarakat lokal yang sebelumnya ditopang hutan pun lenyap. mereka makin sulit berladang jika di desanya sudah dimasuki perusahaan sawit. hutan sebagai sumber bahan pangan, obat, sungai yg jernih jadi hilang. budaya asli mereka jadi tergerus”.

Sebelum melihat lebih lanjut bagaimana isu lingkungan hidup khususnya yang di muat pada media massa, akan ditelaah terlebih dahulu bagaimana media berperan di dalam masyarakat, khususnya dalam mengemas informasi yang pada gilirannya disebarkan kepada masyarakat. Peran utama media massa adalah menyalurkan informasi dan dengan informasi, masyarakat dapat melakukan reaksi terhadap apa yang sedang terjadi atau melakukan antisipasi terhadap segala sesuatu yang mungkin terjadi. Jika tidak ada informasi atau informasi yang diperoleh tidak benar, maka sebenarnya hal itu akan merugikan bahkan membahayakan masyarakat. Oleh karena itu, media massa dituntut memberikan informasi yang benar dalam artian tidak merugikan dan membahayakan masyarakat.

Media massa dapat dimanfaatkan untuk mensinergikan program pemerintah dengan masyarakat. Isu lingkungan dapat dilihat dalam dua sudut pandang, yakni sudut pandang pertama beranggapan bahwa permasalahan lingkungan hidup merupakan masalah besar yang sulit untuk diselesaikan dan menjadi beban masyarakat yang langsung terkena dampaknya. Sudut pandang kedua beranggapan bahwa masalah lingkungan hidup merupakan masalah bersama yang dapat diatasi dengan cara bekerjasama, membangkitkan kepedulian lingkungan di masyarakat dan bagi pemerintah, membuat program yang mendukung pemeliharaan lingkungan hidup.

Lebih lanjut, dalam konteks pengelolaan lingkungan hidup peran media massa dapat dilakukan dengan cara mempromosikan nilai-nilai kepedulian terhadap lingkungan, melakukan kontrol terhadap kebijakan serta menyuarakan tuntutan-tuntutan kebijakan berkenaan dengan pengelolaan lingkungan. Secara konsepsional aspek komunikasi dan aspek kebijakan memiliki hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi. Dalam tataran empiris hubungan tersebut tercermin pada persepsi seseorang dalam merespon isu dan permasalahan lingkungan hidup. Dalam hal ini, media massa sebagai salah satu institusi sosial memiliki kontribusi besar terhadap persepsi seseorang.

Media memiliki peran sangat penting sebagai salah satu alat yang digunakan pada aktivitas komunikasi untuk mempengaruhi proses pengambilan kebijakan. Hubungan media dengan *good environmental governance* menjadi penting mengingat proses pengambilan keputusan suatu kebijakan tidak mungkin dilakukan tanpa partisipasi stakeholders. Secara ideal, dalam hal ini media menjadi wahana untuk menciptakan ruang interaksi pada proses pengambilan kebijakan tadi. Saat ini belum ada sinergi yang baik antara pihak yang berkepentingan bahkan tidak ada sinergi antara masyarakat dalam mengontrol kebijakan pembangunan, semuanya berjalan sendiri-sendiri dan terkesan parsial. Padahal jika tindakan mereka terorganisir bukan tidak mungkin masyarakat dapat menjadi kelompok penekan untuk mengedepankan isu-isu lingkungan. Pemanfaatan media massa sebagai saluran dalam menyampaikan aspirasi tadi merupakan salah satu cara untuk membentuk opini publik sehingga dapat direspon oleh pengambil kebijakan (Bungin, 2008, h. 95).

Data kekerasan terhadap pers berkaitan dengan isu lingkungan khususnya di wilayah Kalimantan diantaranya di Kalimantan Selatan pernah terjadi di tahun 2019 dan kasus berlanjut pada vonis. Ada 2 jurnalis yang dikriminalisasi yaitu Wartawan banjarhit.id yaitu Nanta yang meliput dan membuat produk jurnalistik “Tanah Dirampas Jhonlin, Dayak Mengadu Ke Polda Kalsel (Konflik masyarakat dengan polisi dan Jhonlin Agro Raya

(Perusahaan Batu Bara dan Kelapa Sawit). Nanta sebagai wartawan ini menjadi tersangka karena dianggap melakukan pemberitaan tidak benar (pemberitaan 2019 s.d 2020) dan dianggap melakukan pencemaran nama baik perusahaan. Wartawan Kemajuan Rakyat (Muhammad Yusuf) kasus pemberitaan konflik tanah antara masyarakat dengan PT Multi Agro Sarana Mandiri di Pulau Laut Kalimantan Selatan (2018), wartawan meninggal dunia ketika dipenjara, dan dikenakan kasus pencemaran nama baik perusahaan.

Untuk Kalimantan Tengah kasus kekerasan terhadap jurnalis juga dialami berupa pemukulan sebagaimana dalam pemberitaan adanya (<https://dayaknews.com/kotawaringin-barat/diduga-pukul-oknum-jurnalis-ketua-ormas-dipolisikan/>, 26 Maret 2023). Beberapa para jurnalis yang bertugas dan melakukan jurnalisme dengan isu lingkungan yang krusial rentan mengalami intimidasi, kekerasan, dan juga kriminalisasi. Sementara di beberapa daerah lainnya kekerasan terhadap wartawan hingga menimbulkan korban jiwa juga dialami oleh pemimpin redaksi *lassertoday.com* (<https://beritasampit.com/2021/06/25/puluhan-jurnalis-kalteng-nyatakan-sikap-tolak-dan-usut-kekerasan-terhadap-wartawan/>, Subhan Al Karim, 25 Juni 2021).

Memperhatikan hal tersebut posisi media sebagai mitra pemerintah dan masyarakat mengalami pergeseran. Masa orde baru, kedudukan media dan masyarakat dibawah tekanan pemerintah, dimana pemerintah menguasai media dan menguasai masyarakat. Kebebasan pers pada masa tersebut seperti barang langka. Berdasarkan pengamatan peneliti sebagaimana juga kajian Tappsel (2017) dan Adikara (2022) bahwa pada masa reformasi inipun terjadi tekanan yang kuat pada media, bahwa kebebasan pun dikuasai elit, dimana elit yang dimaksud justru berasal dari kalangan partai politik dan pengusaha, sehingga kebebasan pers yang dimaksud seolah bermakna ambigu. Bahkan para jurnalis ikut terbelenggu dengan berbagai aturan pada media dimana para jurnalis bernaung.

Pada sisi idealis, jurnalis akan menulis apa kenyataan yang terjadi sebagai pelayanan informasi kepada masyarakat, tetapi para jurnalis juga terikat dengan kepentingan yang berlaku pada media ketika berita yang dimuat atau tidak dimuat untuk menjadi sesuatu informasi yang penting bagi masyarakat, sehingga kebenaran informasi menjadi kabur bahkan tidak menutup kemungkinan berubah karena berbagai intervensi. Penentuan berita yang diperoleh jurnalis lapangan diverifikasi dengan ketentuan yang berlaku di media. Secara hakiki peran jurnalis dan peran media berfungsi sebagai sarana informasi dan juga berfungsi sebagai kontrol sosial, namun berada pada sisi dilema ruang bekerja.

Dinamika kehidupan personal jurnalis dengan semua kerumitan dan keinginan yang dialaminya serta ketentuan ideologi organisasi media berpengaruh dalam perjalanan pemberitaan realitas yang dihimpun para jurnalis. Jurnalis berlindung pada ketentuan kode etik jurnalistik ketika meliput berita di lapangan dan media berlindung sebagai industri yang berlaku ketentuan bisnis media. Dua sisi ini berdampak pada desain dan cara menyajikan berita. Media yang mengutamakan kecepatan memiliki kecenderungan penyajian berita tidak akurat. Netralitas media pada suatu kepentingan juga menjadi tantangan, sebab media yang berpihak memiliki kecenderungan meliput berita dengan realitas yang sudah diatur dan realitas dimaksud disesuaikan dengan nilai berita yang berlaku.

1.2 Rumusan Masalah

Penelusuran dari berbagai kajian sebelumnya bahwa dengan adanya konsentrasi terpusat kepemilikan media dan terjadinya kecenderungan konglomerasi media menjadikan sektor ekstratif seperti perkebunan, pertambangan, perbankan, properti, dan sebagainya sebagai nadi dalam menjalankan bisnis media sekaligus pengamanan aktivitas bisnis yang dijalankan. Penelitian ini akan melakukan pembahasan berkaitan dengan berita-berita kritis persoalan isu lingkungan dan sumber daya alam di ranah lokal dengan objek media lokal. Kajian secara

akademis untuk media lokal berkaitan dengan isu lingkungan dan sumber daya alam masih kurang, dan selama ini lebih banyak kajian berfokus pada isu demokrasi dalam pemilu dan pilkada dengan lokasi pada Jakarta dan Jawa *oriented* serta kajian isu lingkungan secara nasional, sehingga dalam kajian ini akan lebih lanjut untuk mendalami berbagai bentuk aktifitas dan konten pemberitaan media yang ada di ranah lokal khususnya di Kalimantan Tengah dalam membahas isu lingkungan dan sumber daya alam, bagaimana para jurnalis ini memposisikan dirinya dalam kegiatan jurnalisme lingkungan termasuk penguasaan struktur politik, struktur ekonomi, struktur jaringannya, relasi kuasa media, ideologi media, isi pemberitaan dan peran jurnalisme lingkungan dalam menekan kerusakan lingkungan di Kalimantan Tengah serta bagaimana kecenderungan isi pemberitaan dapat memenuhi fungsi media yang seharusnya, yaitu mengedepankan kepentingan publik.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

“Bagaimanakah penjelasan ekonomi politik media dalam pemberitaan isu lingkungan dan sumber daya alam pada media lokal di Kalimantan Tengah? “

1.3 Tujuan Penelitian

Pers terdiri dari dari pemilik media, redaksi, jurnalis, dan media itu sendiri merupakan komponen utama dalam menghasilkan berita-berita dan mampu menyentuh aktor dan kebijakan yang melingkupi konten berita. Teori komunikasi lingkungan dan jurnalisme lingkungan menjadi bagian untuk memperoleh data awal tentang kategorisasi persoalan lingkungan dan sumber daya alam. Pendekatan ekonomi politik media, propaganda media, dan kapitalisme media didukung teori hirarki media dan teori hegemoni budaya organisasi media kemudian melihat sisi agenda setting dan penggunaan analisis wacana kritis menjadi

pedoman dalam penelitian ini untuk memperoleh gambaran dan menganalisis bagaimana kondisi dan posisi dari politik ekonomi media lokal untuk menjelaskan relasi kuasa kepemilikan media di Kalimantan Tengah serta pendalaman ideologi media dengan bahasan pada pemberitaan isu lingkungan dan sumber daya alam sensitif dan krusial khususnya pada persoalan sawit dan batubara. Penelitian ini juga melihat gambaran dan menganalisis dinamika politik media lokal dalam konteks Kalimantan Tengah dan bagaimana dinamika ini mempengaruhi pemberitaan isu lingkungan sumber daya alam yang ada di Kalimantan Tengah. Selanjutnya dapat menganalisis peran lebih lanjut dari media lokal yang diteliti ini terhadap persoalan lingkungan dan sumber daya alam.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memberikan kontribusi untuk memperkaya khasanah pada teori komunikasi media massa, jurnalistik, ekonomi politik media, komunikasi politik, dan komunikasi lingkungan dan memberikan pembahasan lebih lanjut untuk memahami ekonomi politik media secara holistik, menguatkan konsep jurnalisme berita, jurnalisme politik, dan jurnalisme lingkungan dengan pendekatan ekonomi politik media dengan mengelaborasi komponen komodifikasi, strukturasi dan spasialisasi, media propaganda dan hegemoni budaya media. Penelitian ini juga dapat dijadikan bahan kajian dan pertimbangan praktis bagi pihak-pihak organisasi media dan bagi para komunitas masyarakat peduli lingkungan dan sumber daya alam, mengingat persoalan lingkungan adalah persoalan yang krusial sebab menyangkut kelangsungan hidup manusia di bumi, maka edukasi dan kampanye kelestarian lingkungan membutuhkan jurnalisme lingkungan dan jurnalisme yang kritis, produktif dan kredibel. Penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas jurnalisme lingkungan dan pers melalui medianya tanpa melihat kepentingan pemilik media dan kelompoknya, sehingga lebih memiliki kekuatan untuk menginformasikan isu-isu lingkungan dan sumber

daya alam dengan model yang tepat dan dapat menjadi pedoman bagi para pemangku kepentingan publik dalam membuat dan mengambil langkah-langkah kebijakan berkaitan dengan persoalan lingkungan dan sumber daya alam.